



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 26 April 2011

Halaman: 9

Media Massa : **KR** Hari : **Selasa** Tanggal : **26-04-2011** Halaman : **9**

Tertinggi, Kesadaran Hukum Masyarakat DIY

YOGYA (KR) - Persentase kesadaran hukum masyarakat di Provinsi DIY menduduki posisi tertinggi se-Indonesia. Hal ini dibuktikan, sampai April 2011 telah terbentuk 22 desa dan 10 kelurahan sadar hukum yang berasal dari 4 kabupaten dan 1 kota.

"Desa/kelurahan sadar hukum menggambarkan bahwa suatu wilayah sudah memenuhi kriteria, yakni tingkat kriminalitas dan jumlah pengguna narkoba rendah serta tidak ada perkawinan di bawah umur. Lingkungan desa juga bersih dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak mencapai 95 persen," kata Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Prof Abdul Bari Azed SH MH dalam peresmian desa/kelurahan sadar hukum di Kanwil Kemenkumham Jalan Gedongkuning, Senin (25/4).

Gubernur DIY Sultan HB X dalam sambutan yang dibacakan Asek I Drs Ichsanuri berharap, desa/kelurahan sadar hukum bukan sekadar seremonial. Tapi benar-benar menjadi embrio masyarakat yang tahu, sadar dan tertib hukum. Melalui desa sadar hukum diharapkan, masyarakat mampu menjaga kredibilitas sebagai masyarakat yang sadar dan cerdas hukum serta mampu menjadi contoh bagi desa sekitarnya.

Gubernur menekankan, pembangunan sadar hukum harus terus dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Ke depan diharapkan masyarakat yang taat hukum bukan lagi menjadi kewajiban tapi kebutuhan. "Sadar hukum penting untuk melahirkan budaya taat hukum," tandas Gubernur.

Peresmian desa/kelurahan sadar hukum ditandai dengan penandatanganan prasasti, penyerahan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Gubernur DIY dan bupati/walikota se-DIY serta pemberian medali kepada 27 camat, 22 kepala desa dan

10 lurah. Turut hadir Bupati Bantul Sri Suryawidati, Wakil Walikota Yogya Haryadi Suyuti.

Pada kesempatan itu juga diserahkan sertifikat ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi VNZ kepada Kanwil Kemenkumham DIY, Lembaga Pemasaryakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan Rumah Tahanan Kelas II Yogya. "Kanwil Kemenkumham DIY adalah pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk

satuan kerja kantor wilayah," kata Kakanwil Kemenkumham DIY Widi Asmoro SH MHUM.

Sertifikat ini diperoleh atas hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh komponen di bidang pelayanan jasa hukum. Sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, pelayanan jasa hukum harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perwujudannya pelayanan harus jelas, sederhana, cepat, transparan, terukur dan akurat sesuai standar pelayanan internasional ISO 9001:2008.

Selain itu juga ditandatangani MoU Forum Dilkmujakpol oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Kakanwil Kemenkumham, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda DIY. MoU ini sebagai perwujudan komitmen terhadap penegakan hukum agar berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan napas dan cita-cita terakhir penegak hukum. Selama ini perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi merupakan suatu hal yang bertentangan dengan azas keadilan untuk semua. Kendala yang sering dihadapi yaitu masalah koordinasi antarpengadilan.

Pada acara itu juga diserahkan penghargaan kepada notaris berkinerja terbaik dalam menjalankan jabatannya pada 2010, yakni Margaretha Maria Sri Dewanti SH dari Kabupaten Bantul serta Ririn Frida Arini SH MKn dari Kulonprogo. (Ast)-g

1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi
1. Bag. Hukum
2.
3.
4.
5.

✓ Positif

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005